

PENERAPAN PENDIDIKAN INKLUSIF PADA PROGRAM KESETARAAN DI PKBM SRIKANDI**Yayu Sondari¹, Dini Ishmatu Amri Hamdani², Sri Nurhayati³**^{1,2,3} IKIP Siliwangi¹yayusondari19@gmail.com**ABSTRAK**

Peran tutor dalam pembelajaran sangatlah sentral, terlebih dalam meningkatkan aktivitas belajar paket kesetaraan khususnya paket B yang memiliki karakteristik dan kebutuhan belajar yang berbeda. Penelitian ini dilakukan berawal dari adanya warga belajar paket B yang mempunyai kebutuhan khusus, sehingga menimbulkan adanya kesulitan bagi para tutor dalam proses pembelajaran. Begitu pula bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) tersebut, apabila tutor tidak memiliki keterampilan dalam membelajarkan warga belajar ABK maka hal ini dapat menyebabkan rendahnya aktivitas belajar warga belajar dalam memperhatikan, bertanya, praktek, mengerjakan tugas, serta kemampuan dalam pemecahan masalah. Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang bagaimana penerapan pendidikan inklusif bagi para tutor kesetaraan paket B di PKBM Srikandi. Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah menganalisis dampak bagi para warga belajar ABK kesetaraan paket B di PKBM Srikandi setelah diterapkannya pendidikan inklusif, mendeskripsikan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan inklusif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya konsep PKBM dan Kesetaraan, konsep pendidikan inklusif, dan konsep Pendidikan Luar Sekolah. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sampel sebagai sumber datanya 8 orang. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara. Yang menjadi responden adalah Pengelola PKBM, Tutor Paket B, dan warga belajar Paket B. Lokasi penelitian di Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi.

Kata kunci : Kesetaraan, Pendidikan Inklusif**PENDAHULUAN**

Pendidikan merupakan hal yang tidak bias dihindari oleh setiap manusia. Pendidikan merupakan upaya pengembangan manusia maupun masyarakat untuk menuju kehidupan yang lebih baik, karena pendidikan memegang peranan yang sangat penting bagi kemajuan dan kehidupan umat manusia.

Kreativitas dan produktivitas sangat berpengaruh untuk meningkatkan mutu sumberdaya manusia (SDM). Sumber daya manusia yang kreatif dan produktif akan menampilkan hasil kerja atau kinerja yang baik, secara perorangan atau kelompok. Pendidikan dapat berperan untuk pembangunan kreativitas dan produktivitas SDM sekaligus penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan dunia kerja dan kesiapan belajar sepanjang hayat.

Pendidikan kesetaraan dirancang untuk memberikan pengakuan terhadap pembelajaran mandiri dan pengetahuan yang diperoleh di luar sekolah. Pendidikan kesetaraan menguatkan kreativitas dan produktivitas yang mungkin telah berkembang pada seseorang melalui pembelajaran kecakapan hidup.

Program Paket A setara SD/MI, Paket B setara SMP/MTs, dan Paket C setara SMA/MA berfungsi untuk menuntaskan wajib belajar duabelas tahun terutama pada kelompok usia 3 tahun di atas usia sekolah dan bagi siapapun yang terkendala memasuki jalur pendidikan formal karena berbagai hal serta bagi individu yang menentukan Pendidikan Kesetaraan atas pilihan sendiri.

Fenomena pendidikan inklusif merujuk pada pendidikan untuk semua anak (*Education For All*) dengan fokus spesifik kepada mereka yang rentan terhadap marginalisasi dan pemisahan. Pendidikan inklusif berarti tutor harus dapat mengakomodasi semua warga belajar tanpa membeda-bedakan kondisi fisik, kemampuan, emosional, sosial dan kondisi lainnya., *EFA* telah menjadi bagian dari kebijakan pemerintah Indonesia sejak pertama kali disepakati pada tahun 2000 melalui Deklarasi Dakkar. *EFA* sangat relevan dengan pendidikan inklusif karena terdapat enam program PUS (Pendidikan Untuk Semua), yaitu Program PAUD, Program Pendidikan Dasar, Program Pendidikan Kecakapan Hidup, Program Kesetaraan, Program Pengarusutamaan Gender, dan Program Peningkatan Mutu Pendidikan (Kemdikbud). selain itu *EFA* juga selaras dengan (Undang-Undang, 2003 Nomor 20)

Penerapan sistem pendidikan inklusif ditujukan untuk pengembangan kurikulum, pengembangan kebijakan, pelatihan tutor, agar para tutor mempunyai keterampilan dalam membelajarkan warga belajar yang mempunyai kebutuhan khusus dan agar warga belajarnya pun dapat memahami setiap materi yang disampaikan oleh tutornya.

Salah satu lembaga yang mempunyai warga belajar yang berkebutuhan khusus adalah lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Srikandi, yaitu warga belajar kesetaraan Paket B. berdasarkan hasil identifikasi dalam satu kelas ini terdapat tiga warga belajar yang berkebutuhan khusus.

Banyak kendala yang dihadapi oleh setiap tutor dalam proses belajar mengajar yang disebabkan adanya warga belajar yang berkebutuhan khusus tersebut. Karena tidak mudah bagi seorang tutor dalam mengajar Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) tanpa mempunyai keterampilan dan spesialisasi tertentu. Ditambah lagi kurikulum yang digunakan di PKBM tersebut tidak menyesuaikan dengan kebutuhan khusus untuk ABK. Ini menyebabkan dampak negatif bagi warga belajar berkebutuhan khusus, karena akan adanya keterlambatan atau terhambat dalam mengejar pelajaran yang disampaikan oleh tutor. Maka dari itu perlu diterapkannya pendidikan inklusif di lembaga PKBM tersebut, khususnya pada program Kesetaraan Paket B.

Dalam sebuah perjalanan tidak selalu berjalan mulus, begitu pula dalam penerapan pendidikan inklusif pada program kesetaraan di Paket B ini. Terdapat beberapa kendala yang harus dihadapi agar penerapan pendidikan inklusif ini dapat berjalan dengan baik.

Masalah-masalah yang dihadapi dalam penerapan pendidikan inklusif di PKBM Srikandi antara lain adalah :

1. Dalam proses belajar mengajar tutor mengacu kepada kurikulum yang digunakan di lembaga tersebut tanpa menyesuaikan dengan kebutuhan khusus untuk ABK
2. Latar belakang pendidikan tutor tidak sesuai dengan spesialisasi yang diambilnya
3. Tutor belum mempunyai keterampilan dalam membelajarkan ABK

Berdasarkan masalah-masalah yang dihadapi dalam penerapan pendidikan inklusif di PKBM Srikandi, maka pertanyaan penelitian yang diajukan adalah :

1. Bagaimana perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan kegiatan pendidikan inklusif di PKBM Srikandi?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di PKBM Srikandi?
3. Usaha-usaha apa saja yang telah dilakukan oleh lembaga dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di PKBM Srikandi?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara obyektif tentang perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan kegiatan pendidikan inklusif, kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan inklusif, dan usaha-usaha apa yang telah dilakukan oleh lembaga dalam mengatasi kendala-kendala pelaksanaan pendidikan inklusif di PKBM Srikandi.

KAJIAN TEORI

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah sebagai suatu wadah berbagai pembelajaran masyarakat yang diarahkan pada pemberdayaan potensi untuk menggerakkan pembangunan di bidang sosial, ekonomi, dan budaya. PKBM dibentuk oleh masyarakat, merupakan milik masyarakat dan dikelola oleh masyarakat untuk memperluas pelayanan kebutuhan belajar masyarakat

Pembentukan PKBM dilakukan dengan memperhatikan sumber-sumber potensi yang terdapat pada daerah yang bersangkutan terutama jumlah kelompok sasaran dan jenis usaha/keterampilan yang secara ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan kesehatan, dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan warga belajar khususnya dan warga masyarakat sekitarnya.

PKBM dibentuk bertujuan untuk memperluas kesempatan warga belajar masyarakat khususnya yang tidak mampu untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas hidupnya.

Terdapat beberapa program kegiatan yang diselenggarakan di PKBM untuk mencapai tujuan dari PKBM tersebut. Program-program yang diselenggarakan di PKBM adalah program-program yang paling dibutuhkan oleh masyarakat sekitarnya, baik program Pendidikan Luar Sekolah maupun program lainnya yang dikembangkan oleh lintas sektoral, salah satu programnya yaitu Kesetaraan.

1. Pengertian Kesetaraan

Pendidikan Nonformal (PNF) merupakan salah satu jalur pendidikan pada sistem pendidikan nasional yang bertujuan antara lain untuk memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat dijangkau dan dipenuhi oleh jalur pendidikan formal. Pendidikan nonformal memberikan berbagai pelayanan pendidikan untuk setiap warga masyarakat memperoleh pendidikan sepanjang hayat yang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan perkembangan zaman. Pembelajaran pendidikan kesetaraan merupakan salah satu alternatif bagi masyarakat yang tidak dapat meraskan pendidikan di jalur formal.

Dalam jurnal (Riza Anugrah Putra, 2017) menuliskan bahwa pendidikan kesetaraan pada penyelenggaraannya harus mengacu pada delapan Standar Nasional Pendidikan yang ditetapkan Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Tahun 2005. Salah satu dari delapan Standar Nasional Pendidikan itu adalah Standar Proses, dalam Standar Proses Pasal 24 menyebutkan bahwa dalam proses pembelajaran meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran dan pengawasan proses pembelajaran. Dalam pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan melalui pembelajaran tatap muka, maka tutorial dan pembelajaran mandiri dalam rangka untuk mencapai tujuan kompetensi yang diharapkan.

Pengertian mengenai pendidikan kesetaraan adalah jalur pendidikan nonformal dengan standar kompetensi lulusan yang sama dengan PKBM, tetapi konten, konteks, metodologi, dan pendekatan untuk mencapai standar kompetensi lulusan tersebut lebih memberikan konsep-konsep terapan, tematik, induktif, yang terkait dengan permasalahan lingkungan dan melatih kecakapan hidup berorientasi kerja atau berusaha sendiri (Rina Kaniati, 2013).

Pendidikan Kesetaraan merupakan pendidikan nonformal yang mencakup program Paket A Setara SD/MI, Paket B Setara SMP/MTs, dan Paket C Setara SMA/MA dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan, keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional peserta didik (Ella Yulaelawati, 2007). Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (UU No 20 /2003 Sisdiknas Pasal 26 Ayat (6)).

Dapat disimpulkan bahwa pendidikan kesetaraan adalah pendidikan nonformal yang terdiri dari program Paket A Setara SD, Paket B Setara SMP, dan Paket C Setara SMA, yang mempunyai standar kelulusan yang sama atau setara dengan sekolah formal dan mempunyai hak yang setara pula untuk memasuki perguruan tinggi atau dunia kerja.

Setiap peserta didik yang lulus ujian kesetaraan Paket A, Paket B, atau Paket C mempunyai hak eligibilitas yang sama dan setara dengan pemegang ijazah SD/MI,SMP/MTs, dan SMA/MA untuk mendaftar pada satuan pendidikan yang lebih tinggi. Status kelulusan Paket C mempunyai eligibilitas yang sama dengan lulusan pendidikan formal dalam memasuki lapangan kerja.

Karakteristik sasaran dan komunitas belajar Pendidikan Kesetaraan dapat beragam sesuai dengan potensi dan kebutuhannya, antara lain : (1) kelompok masyarakat 15-44 tahun,(2) komunitas belajar mandiri, (3) penduduk yang terkendala ke jalur formal karena beberapa faktor.

Sesuai dengan karakteristik sasaran bahwa Pendidikan Kesetaraan ada untuk masyarakat dari usia 15-44 tahun tanpa membeda-bedakan latar belakang ekonomi, sosial ataupun yang lainnya. Ini sesuai dengan konsep hak azasi manusia yang tertuang dalam kitab suci Alqur'an, dengan tidak membeda-bedakan antara yang cacat dengan yang normal dalam kehidupan sehari-hari. Surah An-nur Cahaya 33:61.

“tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang sakit dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri, makan, bersama-sama mereka? Dirumah kamu sendiri atau dirumah bapak-bapakmu, di rumah-rumah ibu-ibumu di rumah saudara-saudaramu.” Demikian Allah menjelaskan ayat- ayatNya, bagimu agar kamu memahami.

Makna yang tersurat pada ayat tersebut, bahwa Allah tidak membeda-bedakan kondisi, keadaan dan kemampuan seseorang yang Allah bedakan adalah keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.

Berbicara mengenai diskriminasi, dalam dunia pendidikan kadang kala ada rasa khawatir apabila menerima warga belajar yang lemah (Anak Berkebutuhan Khusus) di sekolah formal karena dianggap merugikan ditinjau dari hakekat duniawi, dengan alasan apabila sekolah normal menerima anak cacat, maka peringkat sekolah akan menjadi turun dan tidak populer.

Dalam hal ini sistem Pendidikan Inklusif sudah tidak diragukan lagi untuk dilaksanakan dan bagi personal yang melaksanakannya dengan ikhlas tugas ini akan menjadi ladang ibadah.

2. Pengertian Pendidikan Inklusif

Berbicara pendidikan inklusif adalah berbicara semua peserta didik. Peserta didik di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif akan menjadi beragam. Keberagaman

peserta didik ini akan berpengaruh terhadap pengelolaan suatu lembaga atau sekolah sehingga lembaga tersebut diharapkan akan menjadi lebih terbuka, ramah dan tidak mendiskriminasi terhadap semua peserta didik.

Pendidikan inklusif adalah sebuah konsep atau pendekatan pendidikan yang berusaha menjangkau semua individu tanpa kecuali atau dengan kata lain pendidikan inklusif adalah, "Sistem pendidikan yang terbuka bagi semua individu serta mengakomodasi semua kebutuhan sesuai dengan kondisi masing-masing individu", pendidikan inklusif adalah pendidikan yang menghargai perbedaan anak dan memberikan layanan kepada setiap anak sesuai dengan kebutuhannya (Kustawan, 2012).

Pendidikan inklusif merupakan proses menciptakan lingkungan yang ramah terhadap pembelajaran dengan memanfaatkan semua sumber yang ada untuk memberikan kesempatan belajar dalam mempersiapkan mereka untuk dapat menjalani hidup dan kehidupannya (Tarmansyah, 2009).

Dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh (Prastiyono, 2013) mengemukakan bahwa pendidikan inklusif adalah pendidikan yang didasari semangat terbuka untuk merangkul semua kalangan dalam pendidikan. Pendidikan inklusif merupakan implementasi pendidikan yang berwawasan multikultural yang dapat membantu peserta didik mengerti, menerima, serta menghargai orang lain yang berbeda suku, budaya, nilai, kepribadian, dan keberfungsian fisik maupun psikologis.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan inklusif adalah pendidikan inklusif adalah pendidikan yang sebagai sebuah pendekatan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan belajar dari semua anak, remaja dan orang dewasa yang difokuskan secara spesifik kepada mereka yang *disabilitas*, terpinggirkan dan terabaikan.

Lahirnya paradigma pendidikan inklusif sarat dengan muatan kemanusiaan dan penegakan hak-hak azasi manusia. Inti dalam paradigma pendidikan inklusif yaitu sistem pemberian layanan pendidikan dalam keberagaman, dan falsafahnya yaitu menghargai perbedaan semua anak. (Permendiknas, Nomor 70 Tahun 2009 Pasal 1) tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Mempunyai Kelainan atau Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, Pasal 1 bahwa: Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Pengertian pendidikan inklusif yang masih senada dengan Permendiknas di atas yaitu, sesuai dengan (Permendiknas, Nomor 23 Tahun 2008) tentang Standar Kualifikasi Akademik dan kompetensi Guru Pendidikan Khusus, bahwa pendidikan inklusif adalah pendidikan yang memberikan kesempatan bagi peserta didik berkebutuhan khusus

karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial, dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk belajar bersama-sama dengan peserta didik lainnya pada satuan pendidikan umum dan satuan pendidikan kejuruan, dengan cara menyediakan sarana, pendidik, tenaga kependidikan dan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan individual peserta didik.

Menurut (Kustawan, 2012) tujuan dari pendidikan inklusif adalah 1) memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. 2) mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik.

Anak berkebutuhan khusus memerlukan layanan pendidikan yang spesifik yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Anak berkebutuhan khusus ini memiliki apa yang disebut dengan hambatan belajar dan hambatan perkembangan (*barrier to learning and development*). Mereka memerlukan layanan pendidikan yang sesuai dengan hambatan belajar dan hambatan perkembangan yang dialami oleh masing-masing anak.

Anak berkebutuhan khusus terdiri dari anak berkebutuhan khusus permanen yang memerlukan Pendidikan Khusus (PK) dan anak berkebutuhan khusus temporer yang memerlukan Layanan Pendidikan Khusus (PLK). Anak berkebutuhan khusus yang bersifat permanen yaitu mereka yang memperoleh hambatan belajar dan hambatan perkembangan karena penyebabnya berasal dari dalam dirinya (contohnya anak yang memiliki hambatan atau gangguan penglihatan, pendengaran, gangguan motorik dsb).

Anak berkebutuhan khusus yang bersifat temporer yaitu mereka yang memperoleh hambatan belajar dan hambatan perkembangan karena penyebabnya berasal dari luar dirinya. Contohnya anak yang berasal dari keluarga yang tidak mampu, anak dari masyarakat yang terasing dan sebagainya.

Setiap individu mempunyai hak dan kewajiban tidak terkecuali anak berkebutuhan khusus. Mereka pun mempunyai hak dan kewajiban sama seperti individu lainnya. Salah satunya adalah hak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu (TK/RA, SD/MTs, SMA/SMK/MA/MAK) disetiap jenjang pendidikan sesuai dengan kebutuhannya. Hak peserta didik tersebut diantaranya :

- 1) Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama
- 2) Memperoleh layanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, kecerdasan dan kebutuhan khususnya
- 3) Memperoleh bantuan fasilitas belajar, beasiswa atau bantuan lain sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku

- 4) Diterima di sekolah umum dan kejuruan
- 5) Pindah ke jalur, jenjang atau satuan pendidikan lain yang sederajat, atau melanjutkan ke satuan pendidikan atau jenjang yang lebih tinggi
- 6) Mendapatkan layanan pembelajaran dan penilaian hasil belajar yang disesuaikan dengan kemampuannya
- 7) Memperoleh jaminan hukum yang sama seperti anak pada umumnya

Kewajiban Anak Berkebutuhan Khusus dalam rangka menjaga norma-norma pendidikan melalui bimbingan, keteladanan, dan pembiasaan setiap anak berkebutuhan khusus berkewajiban :

- 1) Menjalankan kewajiban sesuai dengan agama yang dianutnya
- 2) Mengikuti proses pembelajaran dengan menjunjung tinggi nilai-nilai etika, norma dan peraturan yang berlaku sesuai dengan kemampuannya..

Kompetensi tutor untuk pendidikan inklusif, mengacu pada karakteristik inklusif dengan anak yang berusia sama menjadi anggota kelas yang sama, saling tolong-menolong dan berbagi pengalaman, mereka mempunyai rasa memiliki pengalaman keberhasilan, sehingga mampu mengembangkan sikap toleransi dan sikap empati.

Dalam kegiatan pembelajaran tutor sebagai fasilitator dan motivator, sehingga dapat menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada anak itu sendiri dan mendorong terjadinya pembelajaran aktif untuk semua anak.

Pada (Permendiknas, Nomor 70 Tahun 2009 Pasal 1) tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dijelaskan bahwa satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang mengakomodasikan kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan bakat, minat dan potensinya. Kemudian dijelaskan pula bahwa pembelajaran perlu mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar peserta didik. Begitu pula dengan penilaian, dijelaskan bahwa penilaian hasil belajar mengacu pada kurikulum yang bersangkutan. Bagi peserta didik yang mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan standar nasional pendidikan dan di atas standar nasional pendidikan wajib mengikuti ujian nasional. Bagi peserta didik yang mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan di bawah standar nasional pendidikan mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

HASIL ANALISIS DATA**1. Perencanaan Pendidikan Inklusif pada Program Kesetaraan di PKBM Srikandi****a. Perencanaan Tujuan**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada responden, diperoleh hasil sebagai berikut :

Responden 3 berinisial RD, menjelaskan bahwa perencanaan tujuan dalam suatu pembelajaran sangatlah perlu, karena dengan adanya perencanaan tujuan akan memudahkan tutor dalam proses pembelajaran. Dan tujuan yang ingin dicapai pun akan lebih jelas.

Responden 4 berinisial RA. menjelaskan bahwa perencanaan tujuan merupakan hal yang utama dalam suatu kegiatan, salah satunya dalam pembelajaran. Karena dengan adanya perencanaan tujuan kegiatan belajar mengajar akan lebih efektif dan efisien.

Kesimpulan:

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan tujuan adalah suatu hal yang pokok dalam sebuah kegiatan, pendidikan/pembelajaran bahkan hidup sekalipun. Perencanaan tujuan merupakan target yang hendak dicapai setelah pembelajaran dilakukan. Dengan adanya perencanaan pembelajaran tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran pun jadi lebih jelas.

a. Perencanaan Materi

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden pada tanggal 23 April 2018 diperoleh hasil sebagai berikut :

Responden 1 berinisial YY mengatakan bahwa materi atau bahan ajar untuk penyelenggara pendidikan inklusif menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan bakat/minat dan potensinya.

Responden 2 berinisial YN menjelaskan bahwa materi untuk pendidikan inklusif harus fleksibel dan mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar peserta didik.

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden dapat disimpulkan bahwa dalam perencanaan materi atau bahan ajar untuk penyelenggara pendidikan inklusif harus mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan bakat, minat, potensi ataupun karakteristik peserta didiknya, agar mereka dapat mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya.

c. Perencanaan Pendekatan dan Metode

Berdasarkan pada hasil wawancara yang dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut :

Responden 1 berinisial YY menjelaskan bahwa pendekatan yang dilakukan lebih kepada pendekatan personal, dan memperlakukan peserta didik itu seperti anak. Akan tetapi harus dibarengi dengan dorongan dari orang tua juga. Kalau metode secara akademik

belum dilakukan, lebih kepada memotivasi anak tersebut karena untuk jadi seperti orang lain itu harus ada upaya dari diri sendiri bukan bergantung dari orang lain, seperti rajin sekolah, rajin menghafal, memberi semangat bahwa ini loh orang yang dulu nya seperti dia tapi mempunyai kelebihan dan bisa sekolah sampai ke paket C.

Responden 2 berinisial YN mengatakan bahwa pendekatan dan metode ternasuk pula hal yang penting yang harus ditentukan dalam perencanaan pembelajaran. Karena pendekatan dan metode merupakan cara untu mencapai tujuan. Pendekatan yang dilakukan yaitu dengan upaya memberikan perlakuan khusus kepada ABK tersebut, memberikan perhatian yang lebih supaya dia bisa setara dengan teman-temannya. Kareana sebenarnya anak tersebut membutuhkan sentuhan, pujian dan kasih sayang.

Kesimpulan:

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pendekatan dan metode pembelajaran lebih kepada pendekatan personal. Memberikan motivasi untuk dapat mengembangkan setiap potensi yang dimilikinys, memberikan perhatian yang lebih supa mereka bisa setara dengan teman-temannya yang lain, memberikan pujian, kasih sayang sehingga mereka merasa di anggap.

d. Perencanaan Pengevaluasian

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan reponden, diperoleh hasil sebagai berikut :

Responden 3 berinisial RD menjelaskan bahwa dalam suatu pengevaluasian hal terpenting yang harus dilakukan adalah mengetahui tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Bentuk dari perencanaan itu bisa berupa RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran), untuk mengetahui perencanaan pembelajaran tutor dapat melihat dari RPP yang disusun.

Responden 4 berinisial RA menjelaskan bahwa perencanaan dalam pengevaluasian perlu dilakukan sebagai acuan untuk para tutor dalam melakukan evaluasi belajar. Evaluasi itu bukan hanya pada saat akhir pembelajaran atau semester. Sebenarnya secara tidak langsung evaluasi itu dilakuakan pada saat proses pembelajaran di kelas. Misalnya seorang tutor bertanya kepada warga belajar tentang materi pengajaran yang telah disampaikan, dengan otomatis tutor akan mengetahui sejauh mana pemahaman warga belajar atas materi yang di samapaikannya melalui jawaban dari warga belajar tersebut.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada 23 April 2018, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pengevaluasian hal yang harus dilakukan adalah mengetahui tujuan pembelajaran yang hendak di capai. Karena dengan mengetahui tujuan para tutor akan mudah dalam melakukan evaluasi, sampai manakah pemahaman yang di dapat oleh warga belajarnya. Apakah sudah mencapai tujuan atau masih perlu perbaikan.

2. Strategi Pelaksanaan Pendidikan Inklusif pada Program Kesetaraan di PKBM Srikandi

Pelaksanaan merupakan langkah aksi dalam suatu kegiatan. Karena itu pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang efektif dan efisien. Yakni tepat guna dan berhasil guna.

a. Waktu Pelaksanaan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan responden, hasil yang didapat adalah:

Responden 1 berinisial YY menjelaskan bahwa pelaksanaan pembelajaran di Paket B berlangsung pada hari Seni samapi dengan hari Rabu yakni pada pukul 09.00 WIB s/d 12.30 WIB. Dan untuk waktu pelaksanaan pendidikan iklusif baik dilakukan pada saat proses pembelajaran ataupun di luar jam pelajaran berlangsung. Karena akan lebih baik lagi jika seorang tutor dapat menjadi teman baiknya di luar.

Responden 2 berinisial YN menjelaskan bahwa waktu pelaksanaan pendidikan inklusif itu bisa dilangsungkan kapan saja, bukan sekedar di dalam kelas. Karena pada dasarnya pendidikan inklusif itu tutor lebih terbuka kepada semua anak yang mengakomodasi semua kebutuhan anak sesuai dengan kondisi masing-masing individu.

Kesimpulan :

Dari penjelasan responden diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan yang terbuka bagi semua individu untuk mengakomodasi kebutuhan anak sesuai dengan kondisinya masing-masing. Jadi akan lebih baik kalo tutor lebih dekat dan memahami karakteristik setiap anak, itu bisa di dapatkan melalui pendekatan di dalam kelas atau pada saat di luar kelas. Contohnya pada saat istirahat berlangsung tutor bisa melakukan pendekatan dan memberi perhatian lebih kepada anak berkebutuhan khusus tersebut.

b. Langkah-langkah Pendidikan Inklusif

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan responden, hasil yang di dapat adalah : Responden 3 berinisial RD menyebutkan langkah-langkah dalam pendidikan inklusif yakni : 1) tutor harus memahami dulu keberagaman karakteristik dari kompetensi setiap warga belajarnya 2) menciptakan kondisi yang menyenangkan dan menantang agar warga belajar merasa penasaran ingin mengetahui secara mendalam dan lebih jauh, 3) tujuan pembelajran disusun secara simple dan diwujudkan secara efektif dan efisien, 4) tugas-tugas diberikan lebih praktis dan memanfaatkan lingkungan sosial dan alam sekitar, 5) warga belajar dilatih lebih berani bertanya dan mengemukakan pendapat dengan kata-kata sendiri.

Responden 4 berinisial RA menambahkan pendapat dari RD yakni, kelas juga dapat memajukan hasil karya dari warga belajarnya dan alat bantu pengajaran lainnya, warga belajar dapat menunjukkan perasaan dan mengutarakan pendapat mereka secara bebas di kelas, penilaian dilakukan secara variatif dan berkesinambungan dan jadi umpan balik pada peserta didik.

Kesimpulan :

Hasil dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah dalam pendidikan inklusif itu dapat dimulai dengan pendekatan dan pemahaman akan karakteristik warga belajarnya, dengan begitu tutor dapat melangsungkan proses pembelajaran lebih efektif dan efisien. Tutor juga dituntut untuk dapat menciptakan suasana kelas yang menyenangkan dan menarik sehingga anak tersebut dapat mengikuti pembelajaran dengan baik.

c. Kendala yang Dihadapi dalam Pendidikan Inklusif

Hasil wawancara yang dilakukan dengan responden, menyatakan bahwa :

Responden 3 berinisial RD mengatakan bahwa kendala-kendala yang dihadapi bisa berasal dari faktor internal maupun eksternal, karena membelajarkan anak berkebutuhan khusus itu memerlukan keterampilan, kesabaran dan keikhlasan yang ekstra. Meskipun mereka mempunyai keterbatasan akan tetapi tidak dapat dipungkiri mereka mempunyai kelebihan yang warga belajar lain tidak punya.

Responden 4 berinisial RA menjelaskan bahwa kendala pendidikan inklusif di kesetaraan ini adalah apabila dalam penyampaian materi lebih lambat dari biasanya, dan mau tidak mau warga belajar yang lain harus mengikuti dan menunggu sampai warga belajar berkebutuhan khusus itu memahami apa yang telah tutor sampaikan.

Kesimpulan:

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi itu datang dari faktor internal dan eksternal. Dari faktor internal bisa berupa dari warga belajar itu sendiri ataupun dari tutor. Sedangkan faktor eksternal bisa berupa pengaruh dari lingkungan sosialnya yang notabene tidak terdaftar di sekolah informal maupun formal (anak yang tidak sekolah).

3. Evaluasi Pendidikan Inklusif pada Program Kesetaraan di PKBM Srikandi

a. Tujuan Evaluasi

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan responden pada tanggal 09 Juni 2018 diperoleh hasil sebagai berikut :

Responden 1 berinisial YY mengatakan bahwa evaluasi adalah proses pengolahan informasi yang bertujuan untuk mengukur pencapaian prestasi belajar peserta didik. Selain itu evaluasi juga digunakan tutor untuk menilai kompetensi peserta didik bahan penyusunan hasil pembelajaran.

Responden 2 berinisial YN mengatakan bahwa tujuannya diadakan evaluasi adalah untuk mengukur sejauh mana pencapaian dari hasil belajar peserta didik, apakah sudah mencapai target yang telah direncanakan sebelumnya ataukah sebaliknya. Dan untuk melihat apakah perencanaan yang dibuat di awal itu cocok diterapkan bagi warga belajar di Kesetaraan atau tidak.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada kedua responden tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan dari adanya evaluasi adalah untuk mengukur ketercapaian prestasi belajar peserta didik. Dan untuk memperbaiki metode, pendekatan, ataupun materi yang sekiranya kurang dipahami oleh peserta didiknya supaya bisa menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya. Evaluasi juga digunakan sebagai alat untuk menilai kompetensi peserta didik bahan penyusunan laporan hasil belajar.

b. Jenis dan Bentuk Evaluasi

Dari wawancara yang dilakukan bersama dengan responden, didapati hasil sebagai berikut :

Responden 1 berinisial YY mengatakan bahwa ada berbagai jenis pengevaluasian bisa berbentuk lisan maupun tulisan. Evaluasi yang biasa dilakukan di PKBM Srikandi itu berupa tes tulis, wawancara dan praktek keterampilan, sebagai contoh akrilik, menjahit dan sebagainya.

Responden 2 berinisial YN mengatakan bahwa bentuk evaluasi sangat beragam, ada yang evaluasinya dilakukan disaat proses pelaksanaan pembelajaran ada pula yang dilaksanakan pada akhir pelajaran. Bentuk evaluasi ini bisa berupa tes tulis seperti mengisi lembar soal, tes lisan seperti wawancara ataupun bisa berupa pidato untuk melatih para peserta didik berani tampil di depan teman-temannya.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua responden dapat disimpulkan bahwa evaluasi sangat beragam bentuknya, ada evaluasi yang berupa tulisan, lisan ataupun praktek. Semua evaluasi ini mempunyai tujuan yang sama yakni untuk mengetahui sejauh mana kemampuan para peserta didik.

c. Langkah-langkah Evaluasi

Berdasarkan pada hasil wawancara yang dilakukan bersama kedua responden, hasil yang diperoleh yaitu :

Responden 3 berinisial RD menjelaskan langkah-langkah dalam pengevaluasian yaitu: 1) memberi tahu warga belajarnya akan hasil belajarnya, 2) menerima masalah dari warga belajar yang berkaitan dengan hasil pembelajaran, 3) membahas masalah itu secara bersama, 4) membantu merumuskan hasil kegiatan.

Responden 4 berinisial RA mengatakan bahwa langkah-langkah dalam pengevaluasian yaitu 1) memberi tahu akan hasil belajar para peserta didiknya, 2) menerima setiap masukan kritikan dan masalah dari warga belajarnya, 3) memecahkan suatu permasalahan tersebut.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pendapat mereka tidak berbeda jauh. Langkah-langkah dalam pengevaluaisn yang pertma dilakukan adalah memberi tahu warga belajarnya akan hasil belajar atau nilai yang diperolehnya, yang kedua pasti akan ada warga belajar yang bermasalah dengan nilai ynag diberikannya, atau mereka merasa tidak puas. Maka langkah selanjutnya adalah tutor harus dapat menerima masalah serta mencari solusi untuk masalah tersebut.

d. Hasil yang Didapat

Dari hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 02 Mei 2018, diperoleh hasil sebagai berikut :

Responden 5 berinisial AH mengatakan bahwa, “selama saya sekolah di Kesetaraan Paket B saya merasa senang, karena lingkungan dan teman-teman saya baik, sebelum saya masuk ke PKBM Srikandi saya sebelumnya sekolah di salah satu SLB dan saya tidak mau sesekolah dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus makanya saya pindah ke PKBM ini, tadinya saya masuk Kesetaraan Paket A dan Alhamdulillah dengan bimbingan para tutor saya dapat naik tingkat ke Paket B”.

Responden 6 berinisial AL mengatakan bahwa, “saya dulu sekolah di sekolah formal, setelah lulus saya melanjutkan ke sekolah non-formal, karena saya tidak bisa masuk ke sekolah formal, saat saya lulus SD saya belum bisa membaca, menulis dan berhitung. Akan tetapi setelah kurang lebih 2 tahun saya sekolah di Kesetaraan Paket B ini saya sudah lancar membaca, dan cara menulis saya pun sudah rapih”.

Responden 7 berinisial SA mengatakan bahwa, “saya senang sekolah di Kesetaraan ini, karena tutor-tutornya baik dan sabar dalam mengajar saya, saya masuk sekolah non-formal karena saya mempunyai keterbatasan, akan tetapi saya tidak mau sekolah di SLB. Selama saya sekolah disini saya sedikitnya mengetahui cara baca tulis yang baik dan benar.”

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa banyak sekali hasil atau manfaat diterapkannya pendidikan inklusif, karena dengan diterapkannya pendidikan inklusif di Pendidikan Kesetaraan Paket B, siapapun bisa mendapatkan pendidikan yang layak tanpa ada diskriminasi dengan warga belajar lain. Mereka disini memperoleh pembelajaran yang semestinya mereka dapatkan.

PEMBAHASAN PENELITIAN**a. Perencanaan Pendidikan Inklusif pada Program Kesetaraan di PKBM Srikandi**

Dalam pengelolaan pembelajaran, komponen perencanaan merupakan hal sangat penting dan yang pertama dilakukan oleh tutor. Oleh karena itu, agar dapat mencapai tujuan yang optimal, harus direncanakan dengan matang dan baik.

Menurut (Sudjana, 2010) perencanaan adalah proses yang sistematis dalam pengambilan keputusan tentang tindakan yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Disebut sistematis karena pendekatan itu dilaksanakan menggunakan prinsip-prinsip tertentu. Prinsip-prinsip tersebut mencakup pengambilan keputusan, penggunaan pengetahuan, dan teknik secara ilmiah, serta tindakan atau kegiatan yang terorganisasi.

Berdasarkan hasil dari pengolahan data yang telah penulis paparkan melalui tabel di atas, yang pertama dengan adanya perencanaan menurut hasil wawancara (WB1 : W1), yakni perencanaan tujuan dalam suatu pembelajaran sangatlah perlu, karena dengan adanya perencanaan tujuan akan memudahkan tutor dalam proses pembelajaran dan tujuan yang ingin dicapai pun akan lebih jelas, disusul oleh hasil wawancara (WB2 : W1), yaitu perencanaan tujuan merupakan hal yang utama dalam suatu kegiatan, salah satunya dalam pembelajaran. Karena dengan adanya perencanaan tujuan kegiatan belajar mengajar akan lebih efektif dan efisien. Dalam suatu proses, tujuan merupakan target yang hendak dicapai setelah pembelajaran dilakukan yang dimana telah dipaparkan pada tabel di atas, dari tabel tersebut menggambarkan bahwa dalam setiap kegiatan apalagi itu pembelajaran perlu adanya suatu perencanaan sebagai acuan dalam pengambilan tindakan atau kegiatan yang akan dilakukan dalam mewujudkan keberhasilan belajar sesuai yang diinginkan.

Lembaga penyelenggara Pendidikan inklusif baik yang ada di jalur formal, non-formal maupun informal harus menyusun sebuah perencanaan. Perencanaan disusun oleh sekolah bersama komite sekolah/pengelola, dan *stakeholder* lainnya dalam bentuk Rencana Kerja Sekolah Jangka Panjang (RKASJP) 8 tahun, Rencana Kerja Sekolah Jangka Menengah (RKASJM) 4 tahun, Rencana Kerja Sekolah Jangka Pendek/Tahunan (RKASJP/T), Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan harus disusun setiap tahun mencakup isi : Visi, Misi, Tujuan Sekolah, Beban Belajar, Struktur dan Muatan Kurikulum (Kustawan, 2016).

Selanjutnya adanya perencanaan materi, menurut wawancara (WA1 : W1) menunjukkan bahwa bahan ajar penyelenggara Pendidikan Inklusif adalah menggunakan kurikulum satuan pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan setiap warga belajarnya, hasil wawancara (W2 :W1) menunjukkan bahwa materi bahan ajar untuk Penyelenggara Pendidikan Inklusif harus fleksibel, mempertimbangkan prinsip-prinsip

kebutuhan dan karakteristik setiap peserta didiknya, hal ini sesuai dengan (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, 2009). Begitu pula dengan penilaian, dijelaskan bahwa penilaian hasil belajar mengacu pada kurikulum yang bersangkutan. Bagi peserta didik yang mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan standar nasional pendidikan dan di atas standar nasional pendidikan wajib mengikuti ujian nasional, bagi peserta didik yang mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan di bawah standar nasional pendidikan mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

Tahap perencanaan selanjutnya adalah perencanaan pendekatan dan metode pembelajaran di pendidikan inklusif. Pada proses pembelajaran Harus disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap peserta didik (metode, pendekatan, media, dan sumber belajar) yaitu hasil wawancara (W1 : W2) menunjukkan bahwa pendekatan yang dilakukan adalah lebih kepada pendekatan personal, karena anak membutuhkan khusus itu membutuhkan perhatian lebih, dan pembelajaran yang khusus. Metode yang dilakukan bisa dengan merancang lingkungan pembelajaran yang ramah terhadap peserta didik. Lingkungan yang ramah terhadap peserta didik sebagai berikut: menempatkan peserta didik sebagai pusat pembelajaran, mendorong partisipasi aktif peserta didik dalam belajar, tutor memahami dan memanfaatkan media pembelajaran adaptif, tutor memilikiminat untuk memberikan layanan pendidikan yang baik.

Menurut (Kustawan, 2016) mengatakan bahwa kegiatan pembelajarn seting pendidikan inklusif antara lain menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan (PAIKEM), antara lain :

- 1) Guru memahami keberagaman karakteristik dan kompetensi peserta didik.
- 2) Peserta didik dan guru belajar bersama secara aktif, onovatif, kreatif dengan penuh ceria dan bahagia.
- 3) Tujuan pembelajaran disusun secara simple dan diwujudkan secara efektif dan efisien.
- 4) Tugas-tugas diberikan lebih praktis, dan memanfaatkan lingkungan sosial dan alam sekitar.
- 5) Peserta didik ebrani dilatih berani bertanya dan mengemukakan pendapat dengan kata-kata sendiri.
- 6) Kelas memajangkan pekerjaan peserta didik dan alat bantu pengajaran.
- 7) Peserta didik dapat menunjukkan perasaan dan mengutarakan pendapat mereka secara bebas di kelas.
- 8) Penilaian dilakukan variatif dan berkesinambungan dan jadi umpan balik pada peserta didik.

Setelah merencanakan pilihan pendekatan dan metode pembelajaran, maka selanjutnya adalah merencanakan evaluasi pembelajaran. Evaluasi adalah langkah perencanaan yang terahir ditentukan. Daalam pengevaluasian hal terpenting yang harus dilakukan adalah mengetahui tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Apabila tujuan yang

hendak dicapai itu keterampilan menjahit, maka cara dan bentuk tesnya bukan dengan soal yang hanya memperoleh jawaban berupa tulisan, tapi warga belajar harus mampu menunjukkan secara perilaku apa yang di inginkan tes itu. Hasil wawancara (WB1 : W1) dan (WB1 : W2) dimana hasil wawancara tersebut menunjukkan betapa pentingnya sebuah perencanaan evaluasi, karena perencanaan evaluasi ini dapat memudahkan tutor dalam melakukan penilaian hasil dari pembelajaran, atau sebagai tolak ukur ketercapaian prestasi belajar peserta didiknya.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa perencanaan dilakukan untuk menyusun rangkaian tindakan atau kegiatan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan tersebut dapat mencakup tujuan umum (*goals*) dan tujuan khusus (*objectives*) yang dimiliki oleh suatu organisasi atau lembaga.

Perencanaan pendidikan nonformal merupakan kegiatan yang berkaitan dengan, pertama, upaya sistematis yang menggambarkan penyusunan rangkaian tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi atau lembaga dengan mempertimbangkan sumber-sumber yang tersedia atau sumber-sumber yang dapat disediakan. Sumber-sumber itu meliputi sumber daya manusia dan sumber daya nonmanusia. Sumber daya manusia mencakup, pamong belajar, fasilitator, tutor, warga belajar, pimpinan lembaga dan masyarakat. Sumber daya non manusia meliputi fasilitas, alat-alat, waktu, biaya, alam hayati dan atau non hayati, sumber daya buatan, lingkungan sosial budaya, dan lain sebagainya (Sudjana, 2010).

b. Strategi Pelaksanaan Pendidikan Inklusif pada Program Kesetaraan di PKBM Srikandi

Dalam sebuah pelaksanaan pendidikan inklusif ada sebuah strategi yang harus dilakukan agar proses pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil pengolahan data wawancara (WA1 : W3) dan (WA2 : W3) pelaksanaan pembelajaran di Paket B PKBM Srikandi dilaksanakan setiap hari Senin s/d Rabu, pada pukul 09.00 WIB sampai pukul 12.30 WIB. Adapun jadwalnya adalah sebagai berikut:

Jadwal Pembelajaran Paket B PKBM Srikandi

No	Hari/Pukul	Bidang Study	Keterampilan
1	Senin, 09.00 WIB – 12.30 WIB	Matematika Bahasa Indonesia	Menjahit
2	Selasa. 09.00 WIB – 12.30 WIB	Bahasa Inggris IPA	Pertukangan bengkel/montir
3	Rabu, 09.00 WIB – 12.30 WIB	IPS PKn PAI	

Selanjutnya tentang pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan ini menempuh :

- 1) Menciptakan kondisi menyenangkan dan menantang agar warga belajar merasa enasaran ingin mengetahui secara mendalam dan lebih jauh.

- 2) Tutor memberi masalah atau dari warga belajar untuk kemudian dibahas bersama
- 3) Warga belajar merespon dan memproses informasi untuk memecahkan masalah
- 4) Memantau warga belajar menjalani kegiatan secara individu dan kelompok
- 5) Menyimak pemecahan dari warga belajar dan
- 6) Membahas masalah yang dikemukakan secara bersama dengan warga belajar

Alasan dilakukannya pembelajaran seperti di atas, mengingat aktivitas warga belajar kalau pendekatan dan metodenya tidak menarik, mereka cenderung bermalas-malasan, tidak bertanya secara aktif, menjawab pertanyaan, apalagi lebih jauh memecahkan permasalahan. Dengan pembelajaran demikian terlihat aktivitas mereka sangat aktif.

Deskripsi di atas, dibenarkan oleh warga belajar, bahwa pembelajaran yang dilakukan tutor cukup menarik, terutama pembelajaran yang sifatnya pemecahan suatu masalah, jadi aktivitas lebih bervariasi ada yang bertanya, menjawab, dan memecahkan masalah, baik sifatnya perorangan maupun bersama dengan tutor. Namun masih ada pula tutor yang menggunakan metode ceramah saja dalam pembelajaran sehingga suasana pembelajaran menjadi jenuh dan membosankan. (WC1 : W2)

Dalam sebuah pembelajaran tentu akan ada sebuah kendala yang akan di hadapi baik itu kendala dari internal maupun eksternal. Hasil pengolahan data wawancara (WB1 : W4) dan (WB2 : W4), menunjukkan bahwa kendala-kendala itu dapat berasal dari warga belajarnya atau tutornya sendiri. Dari warga belajar misalnya, anak berkebutuhan khusus cenderung lamban dalam menerima materi, jadi mau tidak mau warga belajar yang lainnya harus menunggu warga belajar ABK memahami materi yang disampaikan. Jika dilihat dari tutornya yaitu, tidak semua tutor berlatar belakang pendidikan inklusif, jadi tutor harus memperelajari sendiri cara, metode dan pendekatan dengan warga belajar. Karena pastinya akan berbeda pendekatan, metode dan cara pembelajaran dengan warga belajar yang lain. Maka dari itu perlu diadakannya pembinaan atau pelatihan para tutor yang mendatangkan ahli-ahli Dinas Pendidikan Nasional atau PNFI. Sebenarnya, jiwa ketutoran itu akan muncul dengan sendirinya apabila mereka bersentuhan langsung dengan warga belajarnya. Karena setiap tutor itu pasti mempunyai cara tersendiri dalam metode pembelajaran.

c. Penerapan Pendidikan Inklusif

Implementasi pendidikan inklusif berimplikasi atau mengandung konsekuensi logis terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah umum dan sekolah kejuruan, antara lain sekolah harus lebih terbuka, ramah terhadap anak, dan tidak diskriminatif. Menurut (Kustawan, 2016) dalam rangka rintisan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, satuan pendidikan yang akan menyelenggarakan pendidikan inklusif perlu memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Telah memiliki ijin operasional dari Pemerintah Kabupaten/Kota
- 2) Mampu merancang dan menggunakan kurikulum fleksibel

- 3) Tersedia tenaga pendidik dan kependidikan yang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang sesuai dengan prosedur operasi standar
- 4) Tersedia sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan prosedur operasi standar
- 5) Tersedia sumber dana tetap menjamin kelangsungan penyelenggaraan pendidikan dan tidak merugikan peserta didik
- 6) Mendapat rekomendasi penetapan sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dari Pemerintah Kabupaten/Kota dan ditetapkan sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dari Pemerintah Provinsi

Lembaga penyelenggara pendidikan inklusif juga perlu memperhatikan kurikulum yang digunakan, (Kustawan, 2016) mengemukakan dua jenis penentuan kurikulum :

1) Identifikasi dan Assesmen

Assesmen adalah suatu proses pengumpulan informasi tentang perkembangan peserta didik dengan menggunakan alat dan teknik yang sesuai untuk membuat keputusan pendidikan berkenaan dengan penempatan dan program bagi peserta didik tersebut. Melalui asesmen dapat diketahui kemampuan apa yang sudah dimiliki, apa yang belum atau kelemahannya, dan apa yang menjadi kebutuhan peserta didik, sehingga dapat dirancang program pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

2) Pengembangan Kurikulum Fleksibel

Kurikulum fleksibel adalah kurikulum yang mengakomodasi peserta didik dengan berbagai latar belakang kemampuan dengan cara eskalasi, duplikasi, modifikasi, omisi dan substitusi. Tuntutan dan penyesuaian tersebut adalah: 1) merancang pembelajaran yang sama untuk semua peserta didik menjadi merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan khusus peserta didik, 2) mengajarkan materi yang sama kepada peserta didik di kelas menjadi mengajar setiap anak sesuai dengan kebutuhan individualnya dalam setting kelas, 3) merancang dan melaksanakan penilaian yang sama untuk peserta didik di kelas menjadi merancang dan melaksanakan penilaian yang sesuai dengan kebutuhan individualnya. Setelah menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dengan peserta didiknya, maka tutor melakukan setting pembelajaran berupa pendekatan dan metode yang akan digunakan, sebagai mana telah dijelaskan di atas (WA1 : W2) dan (WA2 : W2).

Langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah evaluasi atau penilaian hasil. Berdasarkan hasil pengolahan data wawancara disebutkan bahwa penilaian atau pengevaluasian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian prestasi belajar peserta didik. Penilaian adalah prosedur yang digunakan untuk mendapatkan informasi tentang prestasi atau kinerja peserta didik setelah selesai mengikuti pembelajaran. Hasil penilaian digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap ketuntasan belajar peserta didik, efektivitas proses pembelajarannya, dan umpan balik, selain itu hasil penilaian juga digunakan oleh tutor untuk menilai kompetensi peserta

didik penyusunan pelaporan hasil belajar, dan memperaiki proses pembelajaran informasi tersebut digunakan oleh guru dan satuan pendidikan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan yang akan digunakan untuk menentukan kenaikan kelas dan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.

Penilaian (*evaluating*) sering disalah artikan dan kadang-kadang dianggap sebagai kegiatan untuk mencari kesalahan dan kelemahan suatu program, seseorang atau kelompok yang melaksanakan program. Ada orang yang memberi arti bahwa penilaian adalah sebagai kegiatan menguji suatu hasil produksi, padahal kegiatan demikian merupakan uji hasil. Ada pula yang memberi arti bahwa penilaian adalah kegiatan mengumpulkan data pendukung operasional suatu program seperti sumber biaya dan pengaturan keuangan, padahal kegiatan ini lebih tepat disebut *institutional accounting*. Penilaian bukan pula kegiatan untuk mentes tingkat kecakapan seseorang atau kelompok, sebab kegiatan demikian dikenal dengan istilah tes kecakapan (*achievement test*). Penilaian bukan untuk menetapkan baik buruknya suatu program karena kegiatan tersebut termasuk keputusan (*judgement*). Demikian pula penilaian bukanlah untuk mengukur karakteristik unsur-unsur program sebab kegiatan itu lebih tepat apabila disebut pengukuran (*measurement*). Singkatnya, penilaian bukan kegiatan untuk mencari kesalahan, mentes, mengukur dan memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan program.

Beberapa pakar psikologi dan pendidikan mengemukakan bahwa istilah penilaian mempunyai arti lebih luas dari pengertian yang dikemukakan di atas. (Harris, 2010) dalam "*The Nature And Functions Of Educational Evaluation*" (Steel) yang dikutip oleh Djuju Sudjana mengemukakan bahwa :

"evaluation is the systematic process of judging the worth, desirability, effectiveness, or adequacy of something according to definitive criteria and purposes. The judgement is based upon a careful comparison of observation data with criteria standards (Steele, 1977: 21)

Pengertian ini menjelaskan bahwa penilaian adalah proses penetapan secara sistematis tentang nilai, tujuun efektivitas atau kecocokan sesuatu sesuai dengan kriteria dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses penetapan ini didasarkan atas perbandingan secara hati-hati terhadap data yang diobservasi dengan menggunakan standar tertentu yang telah dibakukan.

Dari evaluasi tersebut dapat dilihat hasil pembelajaran yang telah dilaksanakan. Hasil pengolahan data wawancara (WC1 : W1) menunjukkan bahwa dengan mengikuti program Pendidikan Kesetaraan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif bisa menjadi suatu kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan pendidikan yang layak tanpa ada diskriminasi. Karena tidak sedikit anak berkebutuhan khusus itu tidak mau di sekolahkan di SLB, mereka lebih memilih sekolah di lembaga formal, nonformal ataupun informal yang menyelenggarakan pendidikan inklusif, itu disebabkan karena

mereka juga ingin setara dengan teman-teman yang lainnya. Hasil pembelajaran pun dapat diikuti dengan baik, yang awalnya mereka tidak bisa membaca, menulis dan berhitung pada saat masuk Kesetaraan seiring berjalannya waktu dan bimbingan dari tutor, dan pengelola, anak tersebut dapat berkembang pengetahuannya dan dalam hal akademik pun menjadi lebih meningkat.

Lulusan menjadi akhir dari proses pembelajaran manajemen menjadi sarana untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dari organisasi, tim, dan individu agar tercapainya tujuan. Lulusan atau hasil akhir dari pembelajaran yang diharapkan dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, dan/ atau tidak hanya sekedar bisa diserap oleh tenaga kerja saja tetapi harus mampu membuka peluang sendiri yaitu dengan berwirausaha.

Penerapan pendidikan inklusif pada Program Kesetaraan di PKBM Srikandi ini bisa dikatakan berhasil, karena melihat hasil belajar dan perkembangan anak peserta didik yang terus meningkat. Hasil wawancara (WC2 : W1) yang menunjukkan bahwa dengan mengikuti pendidikan inklusif di PKBM ini membuatnya menjadi lebih baik dalam hal pendidikan. Dengan adanya pendidikan inklusif pada program kesetaraan ini membuka pintu yang selebar-lebarnya bagi siapapun dan dari kalangan manapun, tua atau muda mereka semua berhak mengenyam pendidikan yang sepatutnya sudah menjadi hak bagi mereka.

SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang Penerapan Pendidikan Inklusif pada Program Kesetaraan di PKBM Srikandi dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perencanaan pendidikan inklusif dilakukan dengan, penentuan tujuan yang ingin dicapai, penentuan materi atau bahan pembelajaran, penentuan pendekatan dan metode pembelajaran, serta penentuan cara evaluasi pembelajaran. Hasil perencanaan itu berbentuk Rencana Kerja Sekolah Jangka Panjang (RKASJP) 8 tahun, Rencana Kerja Sekolah Jangka Menengah (RKASJM) 4 tahun, Rencana Kerja Sekolah Jangka Pendek/Tahunan (RKASJP/T), Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).
2. Pelaksanaan pendidikan inklusif di Paket B telah menempuh langkah-langkah: 1) tutor harus memahami dulu keberagaman karakteristik dari kompetensi setiap warga belajarnya 2) menciptakan kondisi yang menyenangkan dan menantang agar warga belajar merasa penasaran ingin mengetahui secara mendalam dan lebih jauh, 3) tujuan pembelajaran disusun secara simple dan diwujudkan secara efektif dan efisien, 4) tugas-tugas diberikan lebih praktis dan memanfaatkan lingkungan sosial dan alam sekitar, 5) warga belajar dilatih lebih berani bertanya dan mengemukakan pendapat dengan kata-kata sendiri, 6) kelas juga dapat memajangkan hasil karya dari warga belajarnya dan alat bantu pengajaran lainnya, 7) warga belajar dapat menunjukkan perasaan dan mengutarakan pendapat mereka secara bebas di kelas, 8)

penilaian dilakukan secara variatif dan berkesinambungan dan jadi umpan balik pada peserta didik.

3. Penerapan pendidikan inklusif dilakukan dengan menekankan kepada aspek pengetahuan dan keterampilannya. Bidang study dilaksanakan dengan tes tulisan dan lisan berupa wawancara dan pendidikan keterampilan dilakukan tes praktek. Selain itu ditempuh langkah memberi tahu warga belajar hasil pembelajarannya, menerima masalah dari warga belajarnya yang berkaitan dengan hasil pembelajaran, membahas masalah dan memecahkan masalah itu secara bersama dan membantu merumuskan hasil kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adikusumo, S. (2000). *Pendidikan Luar Sekolah Wawasan Sejarah Perkembangan Falsafah & Teori Pendukung Asas*. Bandung: Nusantara Press.
- Ardiwinata, J. S., & Mulyono, D. (2018). Community Education in the development of The Community. *Empowerment*, 7(1), 25-35.
- Coombs. (2000). *Pendidikan Luar Sekolah Wawasan Sejarah Perkembangan Falsafah & Teori Pendukung Asas*. Bandung: Nusantara Press.
- Dahar. (2013). *Belajar dan Pembelajaran Sains*. Bandung : Pustaka Reka Cipta.
- Djuju Sudjana. (1996). *Pendidikan Luar Sekolah Wawasan Sejarah Perkembangan Falsafah & Teori Pendukung Asas*. Bandung: Nusantara Press.
- Ella Yulaelawati, U. S. (2007). *Acuan Proses Pelaksanaan dan Pembelajaran Pendidikan Kesetaraan Program A, Paket B, dan Paket C*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Kesetaraan, Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal, Departemen Pendidikan Nasional .
- Esterbag. (2002). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Gagne. (2013). *Belajar dan Pembelajaran Sains*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Harris, W. (2010). *Manajemen Program Pendidikan*. Bandung: Falah Production .
- Jufri, W. (2013). *Belajar dan Pembelajaran Sains*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Kemdikbud. (n.d.). *Kniu.Kemdikbud.go.id*.
- Kolb. (2013). *Belajar dan Pembelajaran Sains*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.

- Koplan. (1996). *Pendidikan Luar Sekolah Wawasan Sejarah Perkembangan Falsafah & Teori Pendukung Asas*. Bandung: Nusantara Press - Yayasan Islam Nusantara.
- Kustawan, D. (2012). *Pendidikan Inklusif dan Upaya Implementasinya*. Jakarta Timur: PT Luxima Metro Media.
- Mulyono, D. (2018). The Strategy Of Managers In Moving Business Learning Group Program In PKBM Srikandi Cimahi City. *Journal of Educational Experts (JEE)*, 1(1), 37-44.
- Nasution. (1988). *Metode Penelitian Kuantitatif ualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta.
- Pemerintah, P. (Pasal 24 Tahun 2005). *Delapan Standar Nasional Pendidikan* .
- Permendiknas. (2008 Nomor 32). *Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru Pendidikan Khusus*. Jakarta.
- Permendiknas. (2009 Nomor 70 Pasal 1). *Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Mempunyai Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bankat Istimewa*. Jakarta.
- Permendiknas. (Nomor 23 Tahun 2008). *Standard Kuallifikasi Akademik dan Kompetensi Guru Pendidikan Khusus*.
- Permendiknas. (Nomor 70 Tahun 2009 Pasal 1). *Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Mempunyai Kelainan atau Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa*.
- Piaget, J. (2013). *Belajar dan Pembelajaran Sains*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- PP. (2005, No. 19 Pasal 18). *Standar Nasioanal Pendidikan*. Jakarta.
- Prastiyono. (2013, Juni). Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif. *Jurnal Administrasi Publik, XI*, 118.
- Rina Kaniati, D. K. (2013, September). Upaya Tutor dalam Menerapkan Pendekatan Pembelajaran Mandiri pada Warga Belajar Paket C di PKBM Pelita Pratama Bandung. *Empowerment, II*, 7.
- Riza Anugrah Putra, M. K. (2017). Penerapan Metode Pembelajaran Mandiri dalam Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik. *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 28.
- Sudjana, D. (2010). *Manajemen Program Pendidikan* . Bandung : Falah Production .
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Tarmansyah. (2009, April). Pelaksanaan Pendidikan Inklusif di SD Negeri 03 Alai Padang Utara Kota Padang. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, IX*, 7.

Undang-Undang. (2003 Nomor 20). *Sistem Pendidikan Nasional* .

Undang-Undang. (2003 Nomor 20). *Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta.

Undang-Undang Dasar, 1. (1945 alinea 4). Jakarta.

Undang-Undang Dasar, 1. (1945 Pasal 28B ayat (2)). Jakarta.

Undang-Undang Dasar, 1. (1945 Pasal 28C ayat (1)). Jakarta.

Undang-Undang, N. (2003). Jakarta: Sikdiknas.

Watson, J. (2013). *Belajar dan Pembelajaran Sains*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.

Well, B. (2013). *Belajar dan Pembelajaran Sains*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.